ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATANNAIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN

(Studi Kasus Pada Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo, Desa Damarwulan)

SKRIPSI

Nama : Elita Maya Citra
NIM : 222015231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN

(Studi Kasus Pada Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo, Desa Damarwulan)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Elita Maya Citra
NIM : 222015231

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan *Good Governance* di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pada Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo, Desa Damarwulan)
Nama	: Elita Maya Citra
Nim	: 22 2015 231
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., AK	**Lis Djuniar, S.E.,M.Si**
NIDN/NBM : 0228115802/1021961	**NIDN/NBM : 0220067101/1115716**

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,AK.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Siapa yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Elita Maya Citra**

Nim : **222015231**

Program Studi : **Akuntansi**

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiblakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
D7DB5AFF913825349
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Elita Maya Citra

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO:

- **Lakukan dan hadapi yang mebuatmu ragu yakinlah pasti akan ada jalan yang terbaik karena Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak bisa lalui.**
- **Hargailah waktu selesaikan tugasmu dan jangan menggulur-ulur waktu karena kesempatan dan waktumu akan hilang begitu saja.**
- **Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.**

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Bapakku Munari Al-Fatah dan Ibuku Sarminah**
3. **Kakak dan adikku tersayang**
4. **Sahabat-sahabatku seperjuangan Triani, Sutia, Tatik, Nisi, Erin, Nopek.**
5. **Kecamatan Air Saleh dan semua pihak yang terlibat**
6. **Almamater**

Abstract

Elita Maya Citra/222015231/2019/The Analysis of Village Financial Management to Improve Good Governance in Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin (Case Study of Saleh Mukti Village, Enggal Rejo Village, Damarwulan village).

The formulation of the problem in this study was how the village financial management in three villages in Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin was. The objective of this study was to find out the village financial management of Saleh Mukti Village, Enggal Rejo Village, Damarwulan village. This study was descriptive research which aimed to analyze the village financial management in order to improve good governance. The data used in this study was primary and secondary data while the data collection techniques were interview and documentation. The data analysis was qualitative analysis, the analysis technique was qualitative analysis technique by analyzing through explanations based on existing theories regarding village financial management to improve good governance. The results of this study showed that village financial management in improving the good governance of Saleh Mukti village, Enggal Rejo village, Damarwulan village has not yet applied the principle of good governance experiencing problems in terms of accountability, participation, transparency.

Key Words : Participation, Accountability, Transparency

PENGESAHAN
NO. 452 Abstract/LB/UMP/ VIII / 2019
Telah diseleksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Elita Maya Citra/222015231/2019/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pada Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo, Desa Damarwulan)

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin?. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Damarwulan, Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkat dan terciptanya *good governance*. Data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif, Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menganalisis melalui penjelasan yang didasarkan teori-teori yang ada mengenai pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Good Governance di Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo, Desa Damarwulan belum menerapkan prinsip *good governance* mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, partisipasi, transparansi.

Kata Kunci : Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

PRAKATA

Bismillahirohmanirohim

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pada Desa Saleh Mukti, Desa Enggal Rejo dan Desa Damarwulan), sebagai upaya untuk melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, Bab 1 Pendahuluan, Bab II Landasan teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran. Penulis menyadari bahwa tidak akan selesai jika tidak adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani maupun rohani kepada penulis dan kedua orang tua tercinta, Bapakku Munari Al-fatah dan Ibuku Sarminah , kakak-kakak dan adikku tersayang, saudara dan teman-temanku yang telah memberikan semangat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., AK dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan

masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan wakil jurusan prodi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL LUAR ..... **i**

HALAMAN JUDUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penulisan 12

D. Manfaat Penelitian ..... `12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 14

1. Pengertian Desa 14

2. Keuangan Desa 15

3. Pengertian Pengelolaan Keuagan Desa 17

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 21

5. *Good Governance* 25

B. Penelitian Sebelumnya 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41

B. Lokasi Penelitian 42

C. Operasionalisasi Variabel 42

D. Data yang Digunakan 43

E. Metode Pengumpulan Data 43

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 44

1. Analisis Data 44

a. Analisis Kualitatif 44

b. Analisis Kuantitatif 45

2. Teknik Analisis 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 46

1. Sejarah Singkat Desa Saleh Mukti 46

2. Visi dan Misi Desa 47

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 48

4. Sejarah Singkat Desa Enggal Rejo 49

5. Visi dan Misi Desa 49

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 50

7. Sejarah Singkat Desa Damarwulan 51

8. Visi dan Misi Desa 52

9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 53

10. Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa 54

B. Pembahasan Hasil Penelitian 60

1. Pengelolaan keuangan desa di tiga Desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin..... 60

a. Perencanaan 60

b. Pelaksanaan 68

c. Penatausahaan 72

d. Pelaporan 64

e. Pengawasan 65

f. Pertanggungjawaban 66

2. Prinsip untuk meningkatkan *good governance* di tiga Desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin 67

a. Akuntabilitas 68

b. Transparansi 69

c. Partisipasi 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk 8

Tabel I.2 Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 9

Tabel I.3 Data Mata Pencaharian Penduduk 9

Tabel I.4 Data Dana Desa 10

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 39

Tabel III.1 Lokasi Penelitian 42

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel 42

Tabel IV.1 Data Dana Desa 67

Tabel IV.2 Hasil Jumlah Peserta Dalam Rapat Musyawarah Desa 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Saleh Mukti 48

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Enggal Rejo..... 51

Gambar IV.3 Struktur Organisasi Desa Damarwulan..... 55

Gambar IV.4 Contoh Papan Informasi 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Program Desa Saleh Mukti

Lampiran 2 Data Program Desa Enggal Rejo

Lampiran 3 Data Program Desa Damarwulan

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset

Lampiran 5 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek

Lampiran 6 Sertifikat Toefel

Lampiran 7 Biodata Penulis

Lampiran 8 Kartu Aktivitas Bimbingan

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sabusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Ade, Irma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Doko Selatan Kabupaten Sigi. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254.

Ayu Amrina Rosyada. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan (EIP), (online), Vol. 4 No. 1. http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/JURNAL%20(01-25-16-11-41-42).pdf. Diakses februari 2016.

Farida. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (online), Vol. 4 No. 5. http:///Dokumentasi/mydocument/download/817-3143-1-PB.pdf.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.

Nasution, Imam Ya'muri. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (jjpe) Vol. 6 No. 1. http://ejournal.undiksha.ac.id/index,php/jjpe/article/view/5697.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung. CV Alfabeta.

Titiek Puji Astuti. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Journal BAKI (Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia), (online). Vol. 1 No. 1. http://e-journal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/view/1694, diakses 31 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Yuliansyah. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang duakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa maka pemerintah mengeluarkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014).

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat mengoordinasi aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu (Yuliansyah & Rusmianto, 2016: 50). Sedangkan menurut V. Wiratna (2015: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan Sumpeno (2011: 213) dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good*.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pemendagri nomor 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangan secara

mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembiayaan (SPP) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (V. Wiratna, 2015: 19).

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang

diberikan. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pempimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat Indra (2010: 385). Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (V. Wiratna, 2015: 21).

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keungan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan mengutungkan bagi banyak pihak (Eko dan Teguh, 2008). Begitu juga dengan desa. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola yang baik (*good governance). good governance* yang baik maka akan mempercepat peningkatan kesejahtreraan masyarakat desa.

Menurut peraturan menteri dalam negri (Permendagri) no: 113 tahun 2014 keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa yaitu azas-azas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Prinsip di mana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal (Sujarweni, 2015: 29). Anggaran bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta penegak hukum (Mardiasmo,2009: 18). Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain

reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Melihat dari prinsip *good governance* ini adanya dana desa yang dialokasikan kedesa cukup besar agar dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga prinsip *good governance* tersebut sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (V. Wiratna, 2015: 27).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina dan Elisabeth, (2016) yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa di kampong Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup produktif dalam pelaksanaan semua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%. Kendala utama yang dihadapi oleh kampong Onggari adalah masih kurangnya pengetahuan dari kompetensi SDM di bidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari pemerintah daerah merauke.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci, (2015) berjudul Akuntabilitas transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hasil penelitian ini adalah manajemen keuangan desa kepatihan sudah

berdasarkan peraturan menteri dalam negri no. 37 tahun 2007 yang menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra, (2014) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: perencanaan ADD di Desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, tranparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di Desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama dalam pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Kabupaten banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Luas Kabupaten Banyuasin adalah 11.833 km^2 dan sebaran penduduk 68 jiwa per/km^2. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 803.895 jiwa. Kecamatan Air Salek adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin, kecamatan ini mempunyai luas wilayah 338,57 km^2. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 37.520 jiwa dengan rincian laki-laki = 18.726 jiwa (49,9%) dan perempuan = 18.776 jiwa (50,1). Sedangkan penduduk yang beragama Islam berjumlah 36.243 orang (96,6%), Katolik 67 orang (0,18%), Protestan 447 orang (1,27%), Hindu 740 orang (1,97%) dan Budha 5 orang (0,01%).

Tabel I.1
Data Jumlah Penduduk

KETERANGAN	**Saleh Mukti**		**Enggal Rejo**		**Damarwulan**	
	L	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
Total Penduduk	1323	1299	1545	1648	1318	1450
Jumlah KK	768		755		681	

Sumber : Kantor Camat Air Salek, 2019

Tingkat pendidikan pada ketiga desa ini masih sangat sedikit yang telah berpendidikan tinggi sehingga kurangnya pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Saleh Mukti	Enggal Rejo	Damarwulan
TK	27	32	37
SD	310	326	238
SMP	320	368	370
SMA	90	110	70
Sarjana, DI, DII, DIII	10	13	22

Sumber : Kantor Camat Air Salek, 2019

Mata pencaharian pada ketiga desa ini mayoritas penduduknya adalah petani. Terdapat juga perkebunan sawit, kelapa, karet yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dapat dilihat pada tabel I.3 dan I.4 berikut ini :

Tabel I.3
Mata Pecaharaian Penduduk

Nama Desa	Mata pencaharian	Jumlah Orang
Saleh Mukti	Petani	530
	Pedagang	25
	Buruh bangunan	50
	PNS/TNI/POLRI	11
	Serabutan	210
	Tenaga Honor	45
	Ibu rumah tangga	105
	Peternak	20

Enggal Rejo	Petani	680
	Pedagang	7
	Buruh bangunan	20
	PNS/TNI/POLRI	8
	Serabutan	108
	Tenaga Honor	17
	Ibu rumah tangga	90
	Peternak	32
Damarwulan	Petani	660
	Pedagang	47
	Buruh bangunan	23
	PNS/TNI/POLRI	9
	Tenaga Honor	34
	Serabutan	79
	Ibu rumah tangga	320

Sumber : Kantor Camat Air Salek, 2019

Tabel I.4
Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan
Air Salek Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018

Nama Desa	Dana desa
Saleh Mukti	1.031.505.437
Damar Wulan	972.253.317
Enggal Rejo	979.488.558
Jumlah	2.983.247.312

sumber : Kantor Camat Air Salek, 2019

Berdasarkan Tabel I.4 di atas, Jumlah anggaran dan pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa Saleh Mukti, desa Enggal Rejo, desa Damarwulan Kecamatan Air Salek tahun 2018 sebesar 2.983.247.312. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, harus dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. Namun, pada kenyataannya di Kecamatan Air Salek masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan perangkat desa sehingga berpotensi terjadi penyimpangan. Perangkat desa yang tidak transparansi kepada masyarakat, perangkat desa seharusnya secara musyawarah mengenai anggaran yang diberikan untuk desa tersebut tetapi yang terjadi masyarakat tidak mengetahui anggaran yang diberikan kepada desa tersebut, hanya perangkat desa saja yang mengetahui, dan mengatur anggaran tersebut.

Masalah lainnya adalah akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. Sebagian besar desa di Kecamatan Air Salek belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan juga masih banyak yang belum terealisasikan (dapat dilihat dilampiran).

Masalah lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa relatif masih rendah, dan sering kali didominasi oleh para elit desa. Masyarakat menjadi kurang aktif dan tidak diikut sertakan dalam pembangunan desa sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasi mereka

apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya program-program pemerintah tersebut.

Tertib dan disiplin anggaran ke-3 desa pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuagan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis membatasi penelitian mengenai azas pengelolaan keuangan desa hanya azas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk tertib dan disiplin angaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang ada di Desa Saleh Mukti, Eggal Rejo, Damarwulan dapat dilihat pada tabel program desa (dilampiran) masih ada yang belum terlaksana dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan dan pada tahap pertanggungjawaban laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada semua masyarakat secara tertulis ataupun melalui papan pengumuman tentu saja itu belum sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemendagri 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengeloan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan *Good Governance* di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya.

1. Bagi Penulis

   Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman yang lebih baik terutama mengenai azas pengelolaan desa.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perangkat desa dalam melaksanakan azas pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sabusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Ade, Irma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Doko Selatan Kabupaten Sigi. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254.

Ayu Amrina Rosyada. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan (EIP), (online), Vol. 4 No. 1. http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/01/JURNAL%20(01-25-16-11-41-42).pdf. Diakses februari 2016.

Farida. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (online), Vol. 4 No. 5. http:///Dokumentasi/mydocument/download/817-3143-1-PB.pdf.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.

Nasution, Imam Ya'muri. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (jjpe) Vol. 6 No. 1. http://ejournal.undiksha.ac.id/index,php/jjpe/article/view/5697.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung. CV Alfabeta.

Titiek Puji Astuti. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Journal BAKI (Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia), (online). Vol. 1 No. 1. http://e-journal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/view/1694, diakses 31 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Yuliansyah. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.